

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI SENTRA WISATA KULINER PENJARINGANSARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

EMPOWERMENT STRATEGIES FOR STREET VENDORS THROUGH THE CULINARY TOURISM CENTER OF PENJARINGANSARI, RUNGKUT DISTRICT, SURABAYA CITY

Revanda Amelia Vega¹, Bellinda Alvania², Alvito Dimas Wibisono³, Hendra Wijayanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

E-mail: revandavamelia@gmail.com¹, bellindaalvania@gmail.com², vitoowibisonoo@gmail.com³, hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id⁴

Abstrak: Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan Jawa Timur memiliki kontribusi besar dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam perekonomian lokal. PKL berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, khususnya di wilayah perkotaan. Namun, keberadaannya juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti kemacetan, kebersihan, dan ketidakteraturan tata ruang. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mengembangkan program Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai bentuk penataan dan pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pemberdayaan PKL di SWK Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto dan Soebiato (2012) yang mencakup empat aspek, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SWK telah dilaksanakan dengan strategi yang mendukung penguatan usaha PKL. Meskipun pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap usaha mereka, program ini tetap menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi mikro. Diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek pemberdayaan dan peningkatan kapasitas teknologi serta kelembagaan guna mendukung pengembangan PKL secara optimal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Sentra Wisata Kuliner, Surabaya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

Abstract: *The city of Surabaya, as the trade center of East Java, benefits significantly from the contributions of street vendors to the local economy. Street vendors play a crucial role in absorbing labor, particularly in urban areas. However, their presence also leads to various social, economic, and environmental issues, such as traffic congestion, cleanliness problems, and disorganized spatial planning. To address these challenges, the Surabaya City Government, through the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade, developed the Culinary Tourism Center program as a means of organizing and empowering street vendors. This study aims to examine the empowerment strategies for street vendors at the Penjaringansari SWK in Rungkut District using a descriptive qualitative approach, based on the community empowerment theory by Mardikanto and Soebiato (2012), which includes four key aspects: human development, business development, environmental development, and institutional development. The findings indicate that the SWK program has been implemented with strategies that support the strengthening of street vendors' businesses. Despite the negative impacts of the COVID-19 pandemic on their operations, the program continues to reflect the government's commitment to supporting microeconomic recovery. Sustainable strengthening of these empowerment aspects, along with improved technological and institutional capacities, is needed to optimize street vendor development.*

Keywords: *Empowerment, Street Vendors, Culinary Tourism Center, Surabaya, Micro Small and Medium Enterprises*



PENDAHULUAN

Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan komersial di Jawa Timur, yang menjadikannya tempat bagi berbagai jenis pedagang, mulai dari skala besar hingga yang terkecil. Di antara mereka, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha mikro kecil yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung perekonomian lokal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal, termasuk PKL, menyerap banyak tenaga kerja dan menyediakan lapangan kerja di daerah perkotaan. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian integral dari sektor informal perkotaan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung sistem distribusi barang dan jasa bagi masyarakat menengah ke bawah. Pilar ekonomi lokal pedagang kaki lima yaitu fleksibilitas bisnis, aksesibilitas barang dan jasa, pendorong ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja. Keberadaan PKL tidak hanya berfungsi sebagai mata pencaharian bagi para pelakunya, tetapi juga sebagai penyangga ekonomi mikro yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Keberadaan PKL di Surabaya tidak hanya menawarkan alternatif makanan dan barang, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan sosial kota. Secara umum, Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat ditemukan di berbagai lokasi strategis, seperti taman, depan sekolah, area swalayan, dan bahkan di pinggir jalan. Keberadaan mereka di tempat-tempat ini sering kali menarik perhatian pengunjung dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan produk mereka hingga ke tepi jalan sebagai sumber penghidupan bagi keluarga mereka. Di satu sisi, keberadaan PKL sangat penting bagi masyarakat, karena mereka menyediakan barang dan jasa yang sering kali tidak dapat ditawarkan oleh

sektor formal. PKL memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah, dengan menawarkan berbagai pilihan makanan, minuman, dan barang lainnya yang terjangkau. Namun, di balik manfaat tersebut, keberadaan PKL juga menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah dampak terhadap kebersihan dan keindahan kota yang sering kali terganggu oleh sampah dan ketidakrapihan area tempat mereka berjualan. Selain itu, keberadaan PKL di tepi jalan dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, menghambat kelancaran kendaraan, dan mengganggu aktivitas pejalan kaki yang seharusnya dapat menggunakan trotoar dengan nyaman. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi pengendara dan pejalan kaki, serta menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menata ruang publik secara efektif. (Sari & Meirinawati, 2021)

Penting untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap PKL di Kota Surabaya. Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, baik secara individu maupun kolektif. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan budaya. Strategi pemberdayaan PKL dapat dikategorikan menjadi beberapa dimensi utama. Dimensi pertama adalah pemberdayaan ekonomi yang meliputi akses terhadap modal usaha, peningkatan keterampilan usaha, diversifikasi produk, dan pengembangan jaringan pemasaran. Strategi pemberdayaan ekonomi mencakup penyediaan kredit dengan tingkat bunga rendah bagi pelaku UMKM, bantuan teknis untuk peningkatan kualitas produk, dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan usaha. Dimensi kedua adalah pemberdayaan sosial yang mencakup penguatan organisasi pedagang, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan modal sosial melalui

pembentukan jaringan kerjasama antarapedagang. Dimensi ketiga adalah pemberdayaan kelembagaan yang meliputi pengembangan sistem tata kelola yang partisipatif, penguatan kapasitas organisasi pedagang, dan peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Pemberdayaan dilakukan dengan sosialisasi, promosi dan informasi, pembentukan paguyuban, bantuan berupa pemberian modal dan pemenuhan sarana prasarana, serta kerja sama dengan investor. Pendekatan ini mengakui bahwa pemberdayaan PKL bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. (Fuadi et al., 2021)

Pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan PKL juga tercermin dalam fungsi kelembagaan yang ada. Bidang Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan sub urusan sarana distribusi perdagangan dilingkup penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan PKL bukan hanya tanggung jawab para pedagang itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan sistematis dari pemerintah daerah.

Kehadiran para PKL di kota memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sumber penghasilan yang cukup bagi penduduk yang berada di lapisan masyarakat marginal. Selain itu, PKL juga berfungsi sebagai produsen barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Dengan keberadaan mereka, PKL tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai produk. Dalam konteks ini, PKL menjadi salah satu elemen kunci yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung,

sehingga keberadaan mereka sangat berharga dalam struktur sosial dan ekonomi kota. PKL beroperasi dengan modal yang relatif kecil dan sering kali berjualan di trotoar, ruang terbuka publik, atau area lain yang dianggap strategis tanpa izin resmi dari pemerintah.

Keberadaan sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), di kota-kota besar juga telah diidentifikasi sebagai penyebab munculnya berbagai masalah. PKL juga dapat berupa penjaja dagangan dengan gerobak, baik yang beroperasi secara mandiri maupun yang bergabung dalam kelompok pedagang. Terdapat berbagai tantangan yang timbul akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar, termasuk isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa masalah yang sering dihadapi meliputi peningkatan biaya untuk penyediaan fasilitas umum, kemacetan lalu lintas, masalah kebersihan, serta dampak urbanisasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya memberdayakan PKL melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam program Sentra Wisata Kuliner (SWK). Dimana Sentra Wisata Kuliner (SWK) adalah inisiatif di mana pemerintah mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2013. Peraturan ini ditujukan untuk memberdayakan dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam upaya mengembangkan potensi wisata kuliner. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyediakan fasilitas yang dikenal sebagai sentra wisata kuliner. (Yuli Ermawati et al., 2023)

Sentra Wisata Kuliner merupakan sebuah lokasi atau area yang menjadi pusat untuk menikmati berbagai jenis kuliner. Dengan kata lain, tempat ini adalah wadah di mana sejumlah penjual kuliner berkumpul dan menawarkan berbagai makanan dan minuman kepada pengunjung. Keberadaan SWK merupakan

salah satu solusi dalam menata PKL agar lebih tertib dan memiliki dampak ekonomi yang lebih positif. Dengan adanya SWK, PKL dapat memperoleh tempat usaha yang lebih layak tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Dengan keberagaman kuliner yang ditawarkan, sentra ini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah. Pengembangan sentra wisata kuliner tidak hanya akan memberikan ruang bagi PKL untuk berjualan, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai destinasi wisata. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dimana tempat ini mampu menyajikan dan menyediakan fasilitas dan aktivitas kuliner dalam rangka mewujudkan kebutuhan para wisatawan atau pengunjung. Sentra wisata kuliner di SWK diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan PKL di daerah.

Sentra Wisata Kuliner ini secara garis secara umum memiliki tiga komponen utama. Pertama, terdapat area untuk makan dan minum yang menyediakan berbagai pilihan kuliner. Kedua, ada area pameran interaktif yang berfungsi untuk menampilkan produk-produk dari start-up di sektor kuliner serta sektor ekonomi kreatif lainnya. Ketiga, Sentra Wisata Kuliner juga dilengkapi dengan area pembelajaran dan workshop yang ditujukan untuk mendukung pengembangan *start-up* kuliner. Di samping itu, pusat kuliner yang dikelola dengan baik mampu menciptakan atmosfer yang menyenangkan bagi para pengunjung, yang pada gilirannya dapat memperpanjang durasi kunjungan serta meningkatkan pengeluaran mereka di area tersebut. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pedagang, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Fasilitas yang memadai, seperti tempat berjualan yang bersih dan aman, juga sangat penting untuk menarik pengunjung. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan PKL untuk

menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik. Selain itu, promosi yang efektif melalui media sosial dan event-event kuliner dapat meningkatkan visibilitas sentra wisata kuliner ini. Fasilitas yang memadai, seperti tempat berjualan yang bersih dan aman, juga sangat penting untuk menarik pengunjung. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan PKL untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik. Selain itu, promosi yang efektif melalui media sosial dan event-event kuliner dapat meningkatkan visibilitas sentra wisata kuliner ini. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam dokumen Pengusaha Bersatu Indonesia Maju (2023) menyebutkan bahwa promosi yang baik dapat meningkatkan daya tarik suatu kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (APINDO., 2023). Event-event kuliner, seperti festival makanan atau lomba memasak, dapat menjadi sarana untuk menarik pengunjung dan meningkatkan interaksi antara PKL dan konsumen. Saat ini, Kota Surabaya memiliki sebanyak 52 SWK yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya adalah SWK Penjaringan Sari.



Gambar 1. Aktivitas Pedangan dan Pembeli di SWK Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya

SWK Penjaringan Sari berlokasi di Jl. Raya Pandugo, Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Sentra Wisata Kuliner Penjaringan Sari merupakan binaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah Perdagangan Kota Surabaya. SWK Penjaringansari terbilang cukup besar sehingga dapat menampung sekitar 28 penjual. Sentra Wisata Kuliner (SWK) Penjaringansari dibangun pada tahun 2015 untuk merelokasikan dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya berdagang di daerah tersebut. Sebelum berada di SWK, kondisi PKL sangat tidak berdaya, dengan tempat berjualan yang kumuh dan tidak layak, serta kurangnya modal. Di SWK, para PKL menerima pemberdayaan meliputi beberapa aspek penting, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta promosi yang efektif. Pelatihan keterampilan dapat mencakup aspek manajemen usaha, pemasaran, dan penyajian produk, serta bantuan stand jualan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Namun, selama pandemi COVID-19, penjualan para pedagang mengalami penurunan drastis, dengan omzet berkurang hampir 50%. Banyak pedagang kesulitan membayar sewa stand, dan beberapa bahkan harus menghentikan operasional. Pasca-pandemi, kondisi PKL masih memerlukan perhatian serius, karena banyak yang belum dapat beroperasi secara optimal akibat keterbatasan modal dan menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendorong pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto 2012 sebagaimana diuraikan dalam karya Afriansyah (2023) yang mencakup empat pendekatan utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (bina manusia), pengembangan usaha (bina usaha), pengelolaan lingkungan (bina

lingkungan), dan penguatan kelembagaan (bina kelembagaan). Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdaya melalui Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Lokasi pelaksanaan penelitian adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Penjaringansari. Lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Penjaringansari. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung kejadian atau langsung kejadian atau kondisi lapangan. Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling melalui wawancara dengan memilih subjek berdasarkan pada fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan PKL di SWK Penjaringansari, Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar pada saat penelitian berlangsung dan menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Di samping itu, sumber sekunder diperoleh dari beberapa referensi jurnal, buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kota Surabaya menerapkan dua strategi utama dalam pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Berikut strategi pengembangan SWK di Kota Surabaya:

1. Melakukan relokasi PKL dari jalanan ke dalam SWK dengan kerjasama dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kemudian Dinkopdag Kota Surabaya melakukan pendataan PKL



untuk dipindahkan ke SWK terdekat 40 lokasi berjualan sebelumnya. Relokasi ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan serta memberikan dapat memberikan lokasi yang lebih baik bagi para PKL untuk berjualan.

2. Dinkopdag Kota Surabaya memastikan bahwa para pedagang yang telah direlokasi dapat mencapai omset yang maksimal setelah beroperasi di dalam SWK. Maka, disediakan pelatihan dengan menggandeng swasta dan akademisi. Pelatihan tersebut mencakup teknik pemasaran yang efektif, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

Dari kedua strategi yang diterapkan, relokasi pedagang kaki lima ke dalam Sentra Wisata Kuliner (SWK) telah berhasil dilakukan dan akan terus bertambah. Namun, strategi kedua yang berfokus pada maksimalisasi omset masih belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran oleh para pedagang, yang menyulitkan mereka dalam menghitung keuntungan. Selain itu, beberapa pedagang juga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi, sehingga tidak mampu melakukan promosi dan penjualan secara online, yang mengakibatkan jangkauan penjualan mereka terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopdag) Kota Surabaya telah memberikan solusi dengan menerapkan sistem single cashier di setiap SWK, yang memungkinkan pengelolaan pembayaran dari para pedagang dapat dipantau dengan lebih mudah dan efisien. Namun, solusi tersebut masih belum diterapkan karena masalah biaya untuk menggaji pekerja kasir di seluruh SWK yang memerlukan anggaran besar. Keberadaan SWK tidak hanya memberikan keuntungan bagi PKL, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih bersih dan teratur di kawasan tersebut.

Dengan adanya pengelolaan yang baik, masalah kebersihan dan ketidakteraturan yang sebelumnya menjadi tantangan bagi PKL dapat diminimalisir. Pengunjung merasa lebih nyaman dan aman saat berkunjung ke SWK, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pengunjung dan potensi pendapatan bagi PKL. Dengan ini menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PKL dalam pengelolaan SWK sangat penting. PKL yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sentra merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap usaha mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung antara PKL dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SWK juga berkontribusi pada keberhasilan program ini, karena mereka dapat memberikan masukan yang berharga mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sentra kuliner.

Pemberdayaan PKL dilakukan melalui pengembangan Sentra SWK terutama pada SWK Penjaringan, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang penulis teliti. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012), yang mencakup empat aspek utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (bina manusia), pengembangan usaha (bina usaha), pengelolaan lingkungan (bina lingkungan), dan penguatan kelembagaan (bina kelembagaan). Melalui pendekatan ini, diharapkan PKL dapat meningkatkan kualitas usaha mereka dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Selain itu, keberadaan SWK juga dapat menarik lebih banyak pengunjung, sehingga menciptakan suasana yang lebih hidup di kawasan tersebut.

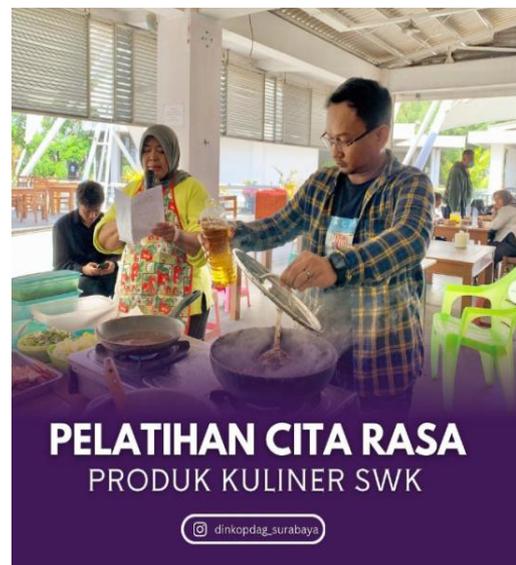
1. Bina Manusia

Menurut Afriansyah (2023), Mardikanto dan Soebianto (2012) mengemukakan bahwa bina manusia merupakan upaya untuk

mengembangkan kemampuan individu dan kelompok masyarakat dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bina Manusia juga bertujuan untuk membentuk sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian dalam diri masyarakat. Sikap kewirausahaan merujuk pada kemampuan untuk berinovasi, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. Profesionalisme diartikan sebagai upaya berkelanjutan dalam mengembangkan keahlian dan penerapan etika profesi. Sementara itu, kemandirian bukan berarti menolak bantuan luar, tetapi lebih pada kemampuan memilih dan menilai apakah bantuan tersebut justru menjerumuskan pada ketergantungan atau tidak. Selain peningkatan kemampuan individu, Bina Manusia tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan posisi tawar masyarakat melalui pengorganisasian. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara birokrasi, akademisi, tokoh masyarakat, dan media.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya secara aktif memfasilitasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui berbagai program pelatihan. Program-program tersebut meliputi pelatihan peningkatan kualitas cita rasa masakan, pelatihan teknik penyajian kopi, pengembangan keterampilan dalam memberi pelayanan (hospitality), serta pelatihan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis mereka. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan sektor swasta, antara lain Tristar Culinary Institute Surabaya,

Ottimmo International Mastergourmet Academy, The Sages International Culinary Business School, serta perusahaan penyedia aplikasi kasir pintar, sehingga para PKL dapat memperoleh pengetahuan tentang peningkatan kualitas produk dan cara memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen serta keterampilan mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia usaha kuliner. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik dan pelatihan teknis, tetapi juga menekankan pada pembangunan kapasitas sosial dan kelembagaan para PKL. Pendekatan ini mencerminkan implementasi nyata dari prinsip bina manusia, yakni memberdayakan individu dan komunitas secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi, berkembang, dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi.



Gambar 2. Pelatihan keterampilan memasak dan meracik minuman yang berkolaborasi dengan perusahaan swasta

Sementara itu dari perspektif Pedagang Kaki Lima (PKL), aspek bina

manusia tidak hanya dirasakan melalui pelatihan yang mereka ikuti, tetapi juga dalam bentuk pembiasaan bekerja sama dengan banyak pihak, pengelolaan internal (dagangannya) secara mandiri, dan penyesuaian diri terhadap perubahan (nilai jual per-hari). Meskipun masih ada tantangan dalam menjaga semangat dan daya tahan, terutama saat krisis seperti pandemi Covid-19, hal ini menunjukkan bahwa bina manusia juga menyentuh sisi ketangguhan mental dan kemauan untuk terus belajar.

2. Bina Usaha

Menurut Afriansyah (2023), Mardikanto dan Soebianto (2012) mengemukakan bahwa bina usaha merupakan aspek penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan dan penguatan usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kecil, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas semata, tetapi juga menciptakan usaha yang dikelola secara efisien, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Bina usaha mencakup pelatihan manajerial untuk meningkatkan keterampilan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran para pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kualitas produk dan layanan juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini, termasuk pelatihan teknik memasak dan penyajian agar mampu menarik lebih banyak pelanggan.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara aktif memfokuskan program ini pada peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan mempermudah akses modal, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga keuangan lewat program KUR. Dinkopdag tidak memberi uang untuk pelaku usaha mikro tidak tapi kami hanya menjembatani dan memfasilitasi. Sehingga dinas bekerja

sama dengan lembaga keuangan lembaga. Keuangan punya program apa yang paling menguntungkan untuk PKL kemudian Dinas menyediakan yang di SWK dan biasanya lembaga menawarkan disitu tetapi sifatnya tidak memaksa. Bantuan yang diberikan perbankan berupa KUR. Jadi PKL yang membutuhkan bantuan langsung diarahkan ke perbankan bukan menggunakan APBD Dinas.

Upaya ini memungkinkan PKL untuk mengembangkan usahanya tanpa harus bergantung pada pinjaman informal yang seringkali bersifat eksploitatif. Selain pembiayaan, pemerintah juga memberikan dukungan berupa infrastruktur pendukung usaha, seperti stand berjualan, air bersih, dan sanitasi. Aspek penting lainnya dalam bina usaha adalah pengembangan strategi pemasaran dan pembentukan jejaring bisnis. Para PKL didorong untuk memanfaatkan media sosial, sistem pemesanan daring, serta promosi digital lainnya guna meningkatkan eksposur dan menjangkau konsumen lebih luas. Pemerintah juga mendorong pembentukan komunitas usaha di dalam SWK, agar terjadi pertukaran informasi, kolaborasi dalam promosi bersama, serta saling dukung antar pelaku usaha.

Implementasi bina usaha telah berjalan dan memberikan fondasi penting bagi peningkatan kapasitas usaha PKL, namun tantangan keberlanjutan dan daya tahan usaha tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Oleh karena itu, keberhasilan bina usaha tidak hanya bergantung pada pemberian pelatihan dan akses modal, tetapi juga pada pendampingan yang konsisten, penyediaan sarana yang layak, dan penguatan ekosistem usaha yang mendukung keberlangsungan PKL

sebagai pelaku ekonomi lokal. Dengan demikian, strategi bina usaha tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan tatanan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

3. Bina Lingkungan

Menurut Afriansyah (2023), Mardikanto dan Soebianto (2012) mengemukakan bahwa Bina Lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan fisik mencakup sumber daya alam seperti hutan, tanah, air, dan udara yang semakin terancam akibat aktivitas pembangunan, pertanian, industri, dan pertambangan. Sementara itu, lingkungan sosial meliputi hubungan antarindividu dan antar kelompok yang turut memengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Bina Lingkungan bertujuan untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga lingkungan. Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap generasi berikutnya. Maka dari itu, pendekatan dalam Bina Lingkungan menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekologis dan sosial dalam setiap perencanaan pembangunan. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah, dan Lembaga Non-Pemerintah, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi

antara semua elemen masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam pelaksanaan program SWK di Penjaringan Sari Surabaya, praktik Bina Lingkungan tampak nyata dalam berbagai aspek yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Salah satunya terlihat dari bagaimana sikap gotong royong diterapkan melalui pembentukan kas bersama yang dikelola secara swadaya untuk membiayai perawatan fasilitas seperti perantingan pohon, kebersihan, dan perbaikan infrastruktur ringan (atap bocor, lampu mati, dll). Hal ini penting karena proses pemeliharaan fasilitas publik dari Pemerintah Kota membutuhkan prosedur resmi dan waktu antrean yang tidak bisa langsung direspons. Oleh karena itu, kepedulian dan keswadayaan pedagang terhadap lingkungan fisik sangat mendukung keberlanjutan SWK sebagai ruang publik yang nyaman dan fungsional.

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke SWK tidak hanya menjadi solusi terhadap masalah ketertiban kota, tetapi juga bentuk pemanfaatan aset pemerintah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini menjadi bagian dari upaya penataan kota yang lebih terarah dan ramah lingkungan. Selain memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang, langkah ini juga membantu menciptakan keteraturan lalu lintas, mengurangi timbulnya sampah di area publik, serta memperindah wajah kota melalui penataan ruang yang lebih tertib dan nyaman bagi semua pengguna ruang kota. Upaya Bina Lingkungan juga tercermin dari adanya pendampingan dan monitoring rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Tenaga pendamping ditugaskan untuk memantau kondisi masing masing SWK dan menyampaikan laporan apabila ditemukan keluhan atau kerusakan yang perlu ditindaklanjuti.

Hal ini memperlihatkan sistem pengelolaan lingkungan sosial yang berbasis koordinasi dan akuntabilitas antara pemerintah dan pelaku usaha di lapangan.

Dengan demikian, pelaksanaan Bina Lingkungan dalam program SWK di Penjaringan Sari menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para pedagang, sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan fisik dan sosial. Melalui kegiatan gotong royong, pengelolaan dana secara swadaya, relokasi PKL yang lebih tertata, serta adanya pendampingan dari pemerintah, tercipta ruang publik yang bersih, tertib, dan nyaman. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan Bina Lingkungan yang menggabungkan aspek sosial dan ekologis dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran bersama antara masyarakat dan pemerintah perlu terus diperkuat untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Bina Kelembagaan

Menurut Afriansyah (2023), Mardikanto dan Soebianto (2012) mengemukakan bahwa bina kelembagaan merupakan salah satu pilar penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bina kelembagaan tidak cukup hanya dilakukan dengan membentuk lembaga, melainkan harus dipastikan bahwa lembaga tersebut berfungsi secara efektif. Artinya, kelembagaan yang dibentuk harus benar-benar mampu mendukung proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kelembagaan yang efektif menjadi kunci keberhasilan upaya pemberdayaan lainnya. Ketika suatu lembaga mampu berjalan dengan baik, maka proses bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan akan jauh lebih

mudah tercapai. Maka dari itu, kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi kokoh bagi berjalannya pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya juga memberikan bantuan peralatan melalui program CSR. Dimana Program CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility, yang mana perusahaan swasta memberikan bantuan untuk mendukung pengembangan usaha para PKL di SWK. Salah satunya adalah bantuan aplikasi kasir tunggal di setiap SWK di Surabaya. Namun rencana penerapan aplikasi kasir tunggal untuk mempermudah catatan omzet para PKL masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi yang akan disediakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada struktur organisasi atau mitra kerja sama, tetapi sangat terkait dengan kesiapan kapasitas para PKL. Dengan demikian, pengelolaan SWK Penjaringan Sari belum sepenuhnya optimal karena hambatan dalam sumber daya dan teknologi serta kesiapan pelaku usaha yang masih perlu ditingkatkan agar program-program yang ada dapat berjalan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan PKL melalui Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditandai dengan keberhasilan dari pemberdayaan PKL di SWK Penjaringan Sari. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya progres yang meningkat dan menunjukkan kondisi PKL setelah

direlokasi ke SWK Penjaringan Sari menjadi lebih berdaya. Unsur keberhasilan tersebut dinilai dari 4 indikator menurut Mardikanto dan Soebiato. Dalam teori Mardikanto dan Soebiato terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Empat pendekatan tersebut yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, bina kelembagaan. Berikut kesimpulan berdasarkan 4 indikator tersebut, antara lain:

- 1) Bina Manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya secara aktif memfasilitasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui berbagai program pelatihan. Program-program tersebut meliputi pelatihan peningkatan kualitas cita rasa masakan, pelatihan teknik, pengembangan keterampilan dalam memberi pelayanan (*hospitality*), serta pelatihan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis mereka. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan sektor swasta, antara lain Tristar Culinary Institute Surabaya, Ottimmo International Mastergourmet Academy, The Sages International Culinary Business School, serta perusahaan penyedia aplikasi kasir pintar
- 2) Bina Usaha Dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya memfokuskan program ini pada peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan mempermudah akses modal, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga keuangan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pedagang juga diperkenalkan pada strategi pemasaran digital dan penggunaan aplikasi kasir pintar. Namun, belum semua pedagang dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal, sehingga hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan omzet usaha mereka.
- 3) Bina Lingkungan dilihat dari Pendampingan rutin oleh tenaga dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya dilakukan untuk memantau 52 kondisi SWK dan menindaklanjuti keluhan atau kerusakan. Dimana para pendamping bertanggung jawab atas pengumpulan kas bersama oleh para PKL untuk membiayai perawatan fasilitas seperti pemangkasan pohon, kebersihan, dan perbaikan ringan. Ini menjadi solusi atas keterbatasan respons cepat dari pemerintah akibat prosedur resmi yang memakan waktu. Serta, relokasi PKL ke SWK juga dimanfaatkan untuk menata kota secara lebih tertib, memanfaatkan aset pemerintah yang sebelumnya tidak optimal, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan bersih. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan PKL.
- 4) Bina Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya memfasilitasi para PKL dengan menjalin kemitraan dengan perbankan, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan. Diberikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), salah satunya berupa aplikasi kasir tunggal di setiap SWK. Namun, penerapan aplikasi kasir tersebut masih menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada dukungan organisasi atau kemitraan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan para PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rapanna Patta. Makasar: Syakir Media Press.
- Afriansyah, Afdhal, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried, Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin, Duwi Siswanto, Rina Widiyawati, & Abdurohim. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Alfiyana, Fatma & Imron Ali. 2019. "Revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) Surabaya." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya* 7(2):1–4.
- APINDO. 2023. "Pengusaha Bersatu Indonesia Maju." *Asosiasi Pengusaha Indonesia*.
https://apindo.or.id/storage/files/annual_source.com.
- Failina, Zahrah Ghoniyyah, and Agus Widiyarta. 2023. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Sentra Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 12(3):328–37. doi: 10.33366/jisip.v12i3.2689.
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>
- Kevin Prajudi dan Ir. Benny Poerbantanoë, MSP. 2023. "Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya." XI(1):193–200.
- Malichah, Ana Lutfiyyatul. 2019. "Pengaruh Jam Kerja, Harga Produk Dan Lokasi Penjualan Pada Hari Perayaan Lebaran Syawal Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pasar Sore Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo* S 53(9):1–18.
- Nabila, Aisya Safira, and Ertien Rining Nawangsari. 2022. "Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8(1):135–44. doi: 10.33506/jn.v8i1.1798.
- Nabillah, Putri Tasya, Elfina Nur Hidayati, Ira Wikartika, Fani Khoiratunnisa, Irmaya Octavia, Elrossi Aisyah, and Nurul Azizah. 2022. "Strategi Branding Sentra Wisata Kuliner Jambangan." *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2(2):1446–53.
- Ningtyas, Andramaya Kusuma, and Yanda Bara Kusuma. 2024. "Peranan Pendampingan UMKM Untuk Meningkatkan Usaha Dan Akses Pasar Pedagang SWK Urip Sumoharjo." *Journal of Creative Student Research* 2(4):103–16.
- Octaviani, Sheila Lucky, and Ardiana Yuli Puspitasari. 2022. "Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Kajian Ruang* 1(1):130. doi: 10.30659/jkr.v1i1.19991.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2013. "Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2013." : 1–2. <https://peraturan.infoasn.id/kota/peraturan-walikota-surabaya-nomor-17-tahun-2013/>.
- Saputri, A. T., Shofiyanti, B. M., Adedarma, E., Salsabila, R., Agustina, A. N. R., Kristiyanti, S. D., Agustina, T. S., Hardi, J., Fitdiarini, N., & Sudarwito, G. (2024). Pemberdayaan Umkm Mak Pesek: Warung Tradisional Yang Bertransformasi Dengan Branding Di Swk Dukuh Menanggal. *Jurnal Penyuluhan Dan*

Pemberdayaan Masyarakat, 3(2), 62–74.

<https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.724>

Sari, Ayu Wandan, and Meirinawati Meirinawati. 2021. “Manajemen Strategi Program Sentra Wisata Kuliner Urip Sumoharjo Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya.” *Publika* 105–18. doi: 10.26740/publika.v9n1.p105-118.

Yuli Ermawati, Moh.Sodikin, and Endah Supeni. 2023. “Strategi Pemberdayaan Umkm Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya.” *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 2(2):390–404. doi: 10.51903/semnastekmu.v2i1.192.